

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Di tengah kompetisi dunia untuk memacu pertumbuhan ekonomi, krisis di kawasan memberi pengaruh besar terhadap keberlangsungan kerjasama dalam sebuah kawasan. Tidak terkecuali Negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerjasama yang dilakukan oleh Negara-anggota ASEAN dalam sektor perdagangan intra-ASEAN menjadi kontribusi terbesar bagi perekonomian Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sendiri.

Jika dilihat dari sekalanya, ekonomi ASEAN tidaklah kecil. Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya pangsa pasar yang tersedia, akan tetapi skala ekonomi yang meliputi 10 negara ASEAN sangatlah prospektif dan menggiurkan bagi Negara-negara maju. Tidak mengherankan apabila tiga Negara raksasa Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea mencoba mengintegrasikan perekonomian mereka dengan ASEAN, demikian juga dengan Negara India di timur maupun Australia dan Selandia Baru di Selatan.

Dalam menghadapi proses pengintegrasian ekonomi ini, ASEAN harus lebih kooperatif dan proaktif dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi, terutama persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup kawasan ASEAN. Dimana sejauh ini, persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup region ASEAN cenderung bertambah kompleks dan bervariasi.

Bahkan ada kalanya permasalahan internal sebuah negara berimbas menjadi permasalahan bersama dalam kawasan. Oleh karena itu menjadi penting bagi setiap negara anggotanya (ASEAN) menjaga dan memelihara stabilitas nasionalnya, walau bagaimana-pun, baik secara langsung atau-pun tidak stabilitas ketahanan nasional setiap negara akan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan. Dan tidak menutup kemungkinan, permasalahan-permasalahan suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap organisasi (ASEAN) kedepannya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menganalisis apakah ada pengaruh dari Krisis politik Thailand terhadap ASEAN lewat judul *“Dampak Krisis Politik Thailand Terhadap Pencapaian Target ASEAN Community 2015”*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai lewat penelitiannya, yaitu:

1. Penulis ingin menganalisa apa pengaruh yang ditimbulkan oleh krisis politik di Thailand terhadap ASEAN baik secara langsung ataupun tidak langsung
2. Penulis berharap bahwa dengan teori-teori yang sudah dipelajari bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang bermanfaat dan menambah khasanah keilmuaan dalam bidang politik dan Ilmu Hubungan Internasional.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara di Asia Tenggara yaitu: Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menyepakati pembentukan kesatuan regional untuk lebih mempererat hubungan yang ada dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan antar anggota dalam ikatan yang berwujud pada sebuah kelembagaan (Organisasional atau Institusional).

Dasar pembentukan ASEAN adalah keinginan dan kepentingan bersama diantara negara-negara anggota untuk mempererat hubungan, kesetiakawanan dan kerjasama regional. Dimana dengan terbentuknya ASEAN diharapkan tercipta suatu fundamen dan wadah yang kuat bagi kegiatan-kegiatan kerjasama regional. ASEAN merupakan wujud nyata dari kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menciptakan suatu lingkungan regional yang di dalamnya terdapat sikap saling menghargai, saling mengerti kepentingan masing-masing anggota, hubungan dinamis antar anggota, dan aspek utama yang dikedepankan adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Keanggotaan ASEAN saat ini meliputi seluruh negara-negara Asia Tenggara atau sepuluh negara anggota. Pada awal pembentukannya yaitu

pada tanggal 8 Agustus 1967, beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pada tahapan keanggotaan selanjutnya, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984, dilanjutkan dengan Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, dan disusul oleh Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja yang menjadi anggota terakhir yang bergabung dengan ASEAN berdasarkan kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-6 di Hanoi pada tanggal 15-16 Desember 1998. Dengan masuknya Kamboja sebagai anggota ASEAN ke sepuluh ini merupakan suatu prestasi dan sekaligus sebagai perwujudan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menciptakan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara atau ASEAN-10.

Dalam usahanya untuk mempererat mekanisme hubungan yang ada seiring dengan terciptanya kebersamaan dan keeratn (Kohesifitas) hubungan antar negara-negara anggota, maka dibuatlah beberapa kesepakatan antar negara-negara anggota. Pada KTT ASEAN I, 23-25 Februari 1976 di Bali, negara-negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation/ TAC) di Asia Tenggara dan Deklarasi Kerukunan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord). TAC merupakan tata perilaku yang mengatur hubungan damai diantara negara-negara anggota, dan ASEAN concord merupakan dasar, prinsip dan kerangka kerjasama ASEAN yang meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi dan fungsional. Pada KTT ASEAN V, 14-15 Desember 1995 di Bangkok, negara-negara ASEAN telah menandatangani Traktat Kawasan

bebas Nuklir di Asia Tenggara (Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone/Treaty of SEANWFZT).

Perwujudan kerjasama negara-negara yang mengikatkan diri pada sebuah organisasi atau Institusi yang bersekala transnasional ini merupakan respon dan kebutuhan dari tiap-tiap negara dalam memenuhi kebutuhan dan menyalurkan kepentingan dari kebijakan luar negerinya. Baik itu dalam bentuk kerjasama ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kepentingan, dan perkembangan kebutuhan setiap negara anggota ASEAN, integrasi ASEAN disadari penting untuk dilakukan. Apalagi saat ini, zaman yang semakin maju dan konstelasi politik dan ekonomi global yang semakin berkembang dengan ditandai oleh saling ketergantungan (interdependensi) antar bangsa yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses globalisasi, khususnya perekonomian dunia yang semakin menyeluruh, dipacu oleh kemajuan-kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai akibatnya, dunia terasa semakin menciut, batas-batas antar negara semakin kabur dan kaidah-kaidah seperti kedaulatan negara dan integrasi teritorial semakin terkikis maknanya.

Gejala saling ketergantungan (interdependensi) antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah nampak sejak beberapa waktu dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini salah satunya dimanifestasikan oleh semakin maraknya kecenderungan ke arah

regionalisme dan terbentuknya berbagai kelompok kerjasama regional baik geografis ataupun fungsional. Misalnya dalam hal ini ASEAN merupakan contoh konkrit dari bentuk regionalisme yang ada di wilayah Asia Tenggara, APEC dalam lingkup Asia Pasifik, dan ASEAN Regional forum (ARF) untuk kerjasama politik dan keamanan di Asia Pasifik.

Semangat regionalisme yang dilandasi dengan adanya interdependensi antar negara ini kemudian menjelma dengan banyaknya bermunculan kerjasama seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 1992 yang di berlakukan mulai tahun 2003, dan akan berakhir dengan terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) atau masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. MEA/AEC ini merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam Visi ASEAN 2020, dimana salah satu pilar utamanya adalah aliran bebas barang (Free Flow of Goods) yang pada tahun 2015 perdagangan barang di kawasan ASEAN dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tariff maupun non-tariff.

Menginjak usianya yang ke-43, eksistensi ASEAN di tengah perkembangan Internasional dan regional maupun persoalan internal yang dihadapi, serta forum dialog dan kerjasama ASEAN memasuki fase baru. Berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan ASEAN yang terdiri dari tiga pilar diusung menjadi paradigm baru untuk membangun kawasan baru yang lebih maju searah tuntutan perubahan di masa mendatang. Tiga pilar yang di usung tersebut yaitu *Mayarakat Ekonomi ASEAN* (ASEAN Economic

Community), *Masyarakat Keamanan ASEAN* (ASEAN Security Community), *Komunitas Sosial-budaya ASEAN* (ASEAN Socio-Cultural Community).

Dalam ekonomi global saat ini, suatu ekonomi regional yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara diperlukan untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, menarik investasi diantara masing-masing negara, dari lingkungan ASEAN maupun dari luar ASEAN. Dan dengan demikian akan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang kesemuanya itu diperlukan untuk mewujudkan suatu pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan dan investasi yang diperlukan untuk mewujudkannya, kita tidak akan mampu mengurangi kemiskinan dan menolong kaum yang miskin. Bila jurang pembangunan mulai dari ekonomi politik dan keamanan dalam ASEAN masih berlanjut, maka proses untuk mewujudkan Komunitas ASEAN akan sulit dicapai.

Dalam tataran keamanan, kompleksitas tarik-menarik antara sentralitas keamanan negara dan keamanan manusia, pemahaman politik nasional dan regional menjadi begitu krusial dalam menentukan keberhasilan penerapan konsep keamanan manusia di negara yang bersangkutan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan konsep ini secara maksimal maka dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang keamanan manusia dalam suatu negara dan keamanan negara itu sendiri melalui kebijakan yang dibuat melalui pendekatan yang fleksibel. Perspektif keamanan ini penting dalam kerangka

mewujudkan stabilitas dalam kawasan yang akan memuluskan pewujudan komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan mitra kerjasamanya.

Sejak ASEAN dibentuk ditahun 1967, hubungan antara pembangunan ekonomi dan keamanan sudah mendapatkan porsi sebagai peran kunci dalam pertimbangan dan persetujuan keamanan regional. Hubungan ini diakui dalam konsep atau doktrin ketahanan nasional dan ketahanan regional yang menggaris bawahi bahwa pembangunan ekonomi setiap Negara anggota merupakan landasan dasar bagi upaya mencapai stabilitas, sebagaimana stabilitas gilirannya merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketahanan nasional (*National resilience*) dan Ketahanan regional (*Regional Resilience*) mencakup seluruh spektrum kehidupan setiap Negara anggota dalam melenyapkan rasa ketidakamanan yang mendalam dari ancaman dan tangan dari luar maupun dari dalam negrei.seperti komunisme, gerakan separatis, perseteruan antar suku, antar agama, dan antar ras (SARA), maupun ancaman dan tantangan terhadap keamanan konvensional Negara – negara anggota sendiri.<sup>1</sup>

Dalam kebijakan dan prinsipnya ASEAN sudah menekankan bahwa Ketahanan Nasional (Nasional resilience)<sup>2</sup> dan ketahanan Regional (Regional resilience) serta keamanan Komprehensif sangat penting dan harus menjadi pandangan bersama demi menciptakan stabilitas kawasan. Pentingnya ketahanan nasional (*national resilience*) yang ditunjang oleh keamanan dan

---

<sup>1</sup> C.P.F. Luhulima.dkk, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR, 2008, hal.35-56

<sup>2</sup> Ibid.hal.44



stabilitas domestik ini kemudian akan mendorong terciptanya Ketahanan regional (*regional resilience*), sehingga di dalam Bali Concord pada 1976 menjadi inspirasi dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Konsep *regional resilience* dalam suatu kawasan bukanlah suatu hal yang sederhana. Untuk mentransformasikan *national resilience* menjadi *regional resilience* diperlukan komitmen yang kuat dalam melakukan kerjasama regional yang tercermin dalam kerangka kerja suatu organisasi.<sup>3</sup> Stabilitas regional adalah alasan utama yang mendasari keberadaan ASEAN, di mana faktor keamanan dianggap penting untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan. Akan tetapi, bukan berarti ASEAN merupakan sebuah pakta pertahanan, namun lebih ke arah bagaimana ASEAN dapat mencapai tujuan utamanya melalui regional “*peace and stability*”, melalui penghargaan atas keadilan dan hukum antar negara. Terlebih lagi kerjasama politik dan keamanan ini agar berjalan dengan lancar dan berkesinambungan harus dilakukan dalam suatu “lingkungan yang adil, demokratis dan serasi”.

Sekali lagi untuk meraih tujuan-tujuannya, negara-negara anggota harus mengusahakan secara sungguh-sungguh terpenuhinya visi dan nilai-nilai bersama demi menciptakan perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Berkaitan dengan ini, negara-negara anggota ASEAN juga memiliki komitmen bersama tidak akan merestui pergantian pemerintahan secara non-konstitusional dan non-demokratis, ataupun

---

<sup>3</sup>Dillo Raditya, *ASEAN sebagai Sarana Diplomasi Indonesia mencapai Ketahanan Regional demi Pembangunan Ekonomi Nasional*, <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/asean-sebagai-sarana-diplomasi.html>. 25 November 2010

penggunaan wilayah mereka untuk kegiatan-kegiatan yang akan mengusik kedamaian, keamanan dan kesetabilan negara-negara anggota ASEAN yang lain.<sup>4</sup>

Pentingnya menciptakan stabilitas keamanan nasional sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan dalam kawasan merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh negara-negara Anggota ASEAN agar kerjasama yang kemudian di gagas oleh ASEAN dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Tantangannya kemudian adalah masih banyaknya persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh ASEAN dalam menyelesaikan persoalan internal kawasannya. Diantaranya adalah masalah HAM, lingkungan, dan krisis politik yang masih menyelimuti sebahagian negara-negara anggota ASEAN. Hal ini terbukti dengan adanya krisis politik yang terjadi di salah satu pendiri ASEAN, yaitu Thailand.

Krisis politik yang mendera Thailand sudah terjadi sejak lama dan belum juga bisa teratasi. Pergantian pemerintahan yang terlalu sering di Thailand serta gejolak politik yang selalu mengirinya, sepertinya makin memperkuat asumsi bahwa hal semacam itu sudah menjadi semacam tradisi di negeri gajah putih ini. Negara ini hampir tidak pernah absen dari liputan media masa dua umumnya dan kawasan khususnya, terutama jika terjadi pergantian pemerintahan. Pada 19 Desember 2006, pihak militer ketika itu melancarkan kudeta terhadap pemerintahan, dan berhasil menggulingkan

---

<sup>4</sup> C.P.F. Luhulima.dkk, *Op.cit.*, hal.40

Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Kudeta akhirnya memaksa Thaksin untuk lengser dari jabatannya dan mengasingkan diri ke luar negeri.

Pasca kudeta, kendali pemerintahan sementara (Council for National Security) di pegang oleh pihak militer. Hingga 17 bulan pasca Kudeta, tampuk kekuasaan masih dipegang pihak-pihak militer. Sebelumnya pemerintahan sementara yang di pegang pihak militer ini berjanji akan memulihkan keamanan dan akan mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan sipil melalui pemilu. Pada Desember 2007 pihak junta militer menggelar pemilu, dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang merupakan jelmaan Thai Rak Thai (TRT) yang merupakan Partainya Thaksin dulu memenangi pemilu. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2008 Samak Sundaravej didaulat dan resmi menjadi PM Thailand.<sup>5</sup>

Namun begitu, pemilu kali ini justru menjadi sumber krisis yang baru. Kelompok-kelompok oposisi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) memobilisasi opini masyarakat untuk menggelar unjuk rasa menentang pemerintah. Di mata para pemimpin gerakan oposisi, PPP hanyalah reinkarnasi dari Partai Thai Rak Thai (TRT) milik PM terguling, Thaksin Shinawatra. Apalagi saat itu, Samak secara terang-terangan memposisikan dirinya sebagai sekutu dekat Thaksin dan partainya. Tidak hanya itu saja, ia bahkan merencanakan untuk mengamandemen undang-undang dasar. Amandemen itu sengaja digelar untuk memuluskan upaya membebaskan Thaksin dari tuntutan hukum. Perlu dicatat juga, meletusnya

---

<sup>5</sup> Lilis Almahera, *Analisis Krisis ekonomi Politik Negara Thailand*, <http://koranindonesia.com/2008/10/15/krisis-politik-di-thailand/>. 13 Mei 2010

kudeta 19 September juga dipicu oleh sikap PM Thailand saat itu yang kerap menyalahgunakan wewenangnya. Tidak hanya itu saja, istri Thaksin juga dituding memanfaatkan pengaruh kekuasaan suaminya. Parahnya lagi, sejumlah menteri dari kabinet Thaksin juga terlibat beragam skandal korupsi. Di sisi lain, PM terguling dinilai tidak memiliki keseriusan dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. Ia juga dianggap sudah tidak memiliki kecakapan lagi dalam menjalankan amanat konstitusi. Tewasnya 57 warga muslim lantaran dikurung secara berdesakan dalam sebuah truk militer, tuduhan investasi ilegal dalam sebuah perusahaan telekomunikasi Singapura, dan lari dari pembayaran pajak serta pada akhirnya Thaksin dinilai sudah tidak cakap lagi dalam menjalankan pemerintahan merupakan sejumlah kasus penting yang menyulut munculnya kudeta 19 September 2006.

Gelombang protes yang diorganisir oleh kaum oposisi dari Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (PAD) semakin lama semakin meluas. Sedemikian masifnya gelombang unjuk rasa anti-pemerintah, sampai-sampai PM Samak pun terpaksa mengundurkan diri. Pasca mundurnya Samak, situasi Thailand ternyata tak juga menjadi lebih baik. Posisi Samak yang digantikan oleh Somchai Wongsawat (2008) malah memunculkan masalah yang lebih besar. Kubu oposisi yang dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) menilai pemilihan Somchai tidak melalui cara-cara yang konstitusional. Apalagi PM yang baru itu adalah kakak ipar Thaksin dan kemungkinan besar ia pun bakal meneruskan kartel kekuasaan keluarganya. Kondisi ini membuat tuntutan oposisi semakin kuat dan mendapat banyak dukungan rakyat. Akhirnya

kekuatan oposisi berhasil mendorong Mahkamah Konstitusi untuk memecat PM Somchai Wongsawat dan membubarkan partai penguasa.

Pasca pemecatan Wongsawat, sebagai akibat desakan kuat kubu PAD, pemilu parlemen pun dilaksanakan kembali sesuai dengan aturan konstitusi. Kali ini, Abhisit Vejjajiva (2009), kader dari Partai Demokrat terpilih sebagai PM. Namun kini giliran kelompok UUD yang berusaha menggoyang pemerintahan baru Thailand. Kubu yang dulunya jadi penguasa itu, kini memposisikan dirinya sebagai pihak oposisi. Mereka mempersoalkan penyelenggaraan pemilu yang dinilainya tidak adil.

Pada saat itu kubu oposisi yang didominasi oleh para pendukung Thaksin membentuk Front Demokrasi Bersatu Anti-Kediktatoran (UUD). Selama setahun belakangan ini, sudut-sudut kota Bangkok tak pernah sepi dari demonstrasi jalanan kelompok pendukung UUD. Aksi unjuk rasa jalanan itu makin meningkat semenjak awal Maret 2010 lalu. Kubu oposisi yang beratributkan warna merah menuntut PM Vejjajiva mengundurkan diri, pembubaran parlemen, dan digelarnya pemilu parlemen.

Tiga tuntutan utama yang digulirkan kelompok Baju Merah ini pun akhirnya mendorong Thailand ke dalam babak baru kekerasan. Sedemikian dahsyatnya gelombang kekerasan kali ini, sampai-sampai Center World, pusat perdagangan terbesar dan terpenting di Bangkok pun tak lepas dari amukan massa hingga akhirnya hangus terbakar. Bersamaan dengan itu 33 bangunan penting lainnya ikut terbakar. Lebih dari 80 orang tewas dan seribu lainnya cedera akibat aksi kekerasan yang dimotori kelompok UUD (Baju

Merah). Ketika aksi kerusuhan mencapai puncaknya pada pertengahan Mei 2010, PM Vejjajiva pun akhirnya memenuhi tuntutan para demonstran yang menginginkan pembubaran parlemen dan digelarnya pemilu. Namun persetujuan atas dua tuntutan utama kelompok UUD tidak juga mampu mengendalikan kekerasan. Kubu oposisi masih bertahan menggelar aksi demo jalannya hingga seluruh tiga tuntutan utamanya dikabulkan. Selama empat tahun belakangan ini, Negeri Gajah Putih (Thailand) hanya menjadi ajang pertarungan politik berwarna, antara kelompok Baju Kuning dan Baju Merah. Sudah dua perdana menteri yang berhasil ditumbangkan oleh Baju Kuning. Sementara Baju Merah hingga kini masih berjuang meraih ambisinya.

Dimata para analis politik, jika kondisi yang terjadi saat ini masih berlanjut maka masa depan Thailand-pun bakal terus dihantui oleh ketidakpastian, dan stabilisasi dalam negeri Thailand akan terganggu.<sup>6</sup> Seperti yang kita tahu bahwa Thailand, terutama Bangkok sebagai ibu kota negeri gajah putih ini merupakan tempat pertamakalinya beberapa pemimpin negara menandatangani komitmennya untuk mengintegrasikan diri dalam sebuah wadah kerjasama regional lewat deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Bangkok yang kemudian dimanifestasikan kedalam nama ASEAN. Selain dari itu, Thailand juga termasuk kedalam jajaran negara yang memiliki arti penting sebagai negara inti dan sekaligus salah satu pendiri aripada ASEAN itu sendiri. Bahkan menurut Sartika Soesilowati, Thailand bersama Indonesia adalah negara yang memegang peran sangat penting dalam keanggotaan

---

<sup>6</sup> *Ketidakpastian Masa Depan Thailand*, <http://indonesian.irib.ir/index.php/politik/perspektif/22243-ketidakpastian-masa-depan-thailand-.html>. 30 Mei 2010

ASEAN. Kehadiran, komitmen, dan peran aktifnya diperlukan dalam implementasi bagi penciptaan integrasi kawasan Asia Tenggara seperti yang disepakati bersama dalam rencana cetak biru ASEAN, seperti ASEAN Charter dan pembentukan Masyarakat ASEAN. Thailand menjadi kekuatan inti pendorong bagi kawasan ini. Tanpa peran aktif Thailand, cetak biru bagi integrasi ASEAN mustahil tercapai. Hal ini mengingatkan kita pada masa-masa reformasi dan pergantian politik di Indonesia 1998-2002. Saat itu konsentrasi para pemimpin Indonesia lebih pada situasi keamanan dan politik dalam negeri. Masa ini dianggap salah satu titik nadir dalam perkembangan ASEAN. Nasib ASEAN akan terulang lagi bila Thailand tetap terpuruk dalam krisis seperti sekarang ini. Karena, mau tidak mau, pemerintahan Thailand juga akan lebih memprioritaskan diri kedalam pembenahan internal ketimbang mengurus masalah ASEAN.<sup>7</sup> Sekali lagi, terjadinya krisis ini sangat disayangkan, mengingat Thailand merupakan salah satu Negara kunci dan penting di antara ke-10 negara anggota ASEAN. Dimana di Bangkok, ibukota Thailand, ASEAN dideklarasikan 43 tahun yang lalu.<sup>8</sup>

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang yang sudah di utarakan di atas, muncul sebuah pokok permasalahan yang menarik untuk di angkat, yaitu ***“Bagaimana Dampak Krisis Politik Thailand Terhadap Pencapaian Target ASEAN Community 2015”***

<sup>7</sup> Sartika Soesilowati, *Rusuh Thailand, Problem Bagi ASEAN*, <http://padang-today.com/index.php?today=article&id=1163>. 22 Desember 2010

<sup>8</sup>“*Krisis Thailand, Perburuk Citra*

*ASEAN”*, [http://www.suluhnusantara.com/mags/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6630&Itemid=36](http://www.suluhnusantara.com/mags/index.php?option=com_content&task=view&id=6630&Itemid=36). Diunduh pada 03 November 2010

## E. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan antar variable berdasarkan konsep atau definisi. Teori memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu penelitian dikarenakan dengan unsur-unsur inilah peneliti akan mencoba menerangkan fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala sosial yang menjadi pusat perhatian. Menurut Masri Singarimbun, teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan dan proposisi untuk menerangkan suatu hubungan antar konsep. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan variable lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.<sup>9</sup>

Dalam sebuah penelitian, teori menurut W. Gulö memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah eksplanatif, atau menjelaskan. Suatu teori harus mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang terdapat dalam pengalaman empiris. Fungsi kedua adalah fungsi prediktif atau fungsi peramalan atau perkiraan. Fungsi ketiga adalah fungsi kontrol. Teori tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan, tetapi juga mampu mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah pada hal-hal yang negatif.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan menggunakan beberapa teori atau pendekatan teoritik yang di pakai untuk menganalisis, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan diatas.

---

<sup>9</sup> Masri singarimbun dan Sfyand Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1989, hal.37

<sup>10</sup> W. Gulö, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, Hal.4-5



## 1. REGIONALISME

Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan ‘Studi Kawasan (*Area Studies*). Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah *region* (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpah tindih.

Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah “Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketegantungan ekonomi yang saling menguntungkan (Interdependensi), komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”.<sup>11</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, Teuku May Rudy menyatakan bahwa:

“Dalam Studi Kawasan, yang lazim disebut pula Studi Wilayah (*Area Studies*), terdapat tiga model atau kajian utama, yaitu: (i) Kajian Ciri-ciri Khusus (*typical Studies*), (ii) Kajian Peristiwa-peristiwa (*Study of Events*), dan (iii) Kajian Kecenderungan Regionalisme (*Regionalism*) dan Organisasi Kerjasama Regional (*Regional Cooperations*).<sup>12</sup>

Selanjutnya T. May Rudy (1997), menegaskan bahwa hal terpenting dalam kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan (*level of cohesion*), struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik (*sturucture of relations*) dalam suatu kawasan, serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerja sama regional tersebut.

---

<sup>11</sup> Nuraeni S., dkk mengutip dari Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbaach: 1973

<sup>12</sup> Nuraeni S., dkk, *REGIONALISME Dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal.1-3 (dikutip dari T. May Rudy, 1997:8)

Merujuk pada aktivitas kerjasama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Disamping itu, kerjasama regional mungkin mengarah pada terciptanya institusi formal, namun dengan struktur yang longgar, berupa pertemuan-pertemuan rutin yang menghasilkan aturan-aturan sekaligus dengan mekanisme pelaksanaan dan persiapan untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut (Hurrel, 1995: 42).<sup>13</sup>

Munculnya kembali regionalisme (1990-an) dalam percaturan politik dunia mendapat reaksi yang berbeda-beda: ada yang optimis, dan ada yang pesimis. Mereka yang optimis memandang regionalisme sebagai sebagai sesuatu yang positif dan menjadi ciri tatanan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin di mana regionalisme berperan sebagai penyeimbang (*balance*) interaksi aktor-aktor dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, baik individu ataupun negara. Sementara pihak yang pesimis, memandang regionalisme hanya sebagai sebuah tren, yang sifatnya sementara karena keberadaannya dilandaskan pada kepentingan sesaat. Regionalisme yang berkembang pada pasca 1990-an tidak lagi bersifat *high politics*, melainkan *low politics*, dimana aspek-aspek ekonomi, budaya, lebih mendominasi kerjasama antar negara-negara.

---

<sup>13</sup>Ibid, Hal.10

Kemunculan dan kemajuan serta dilirikinya kembali organisasi regional pasca Perang Dingin sebagai sebuah kemajuan dalam dunia Internasional dianggap sebagai sebuah langkah awal pertumbuhan kerjasama Internasional yang alami, dan itu sesuai dengan PBB yang mana kinerjanya mendukung dan beriringan dengan program-program PBB, terutama pasal 52-54 mengenai kesepakan kawasan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, organisasi regional dilibatkan kiprah dan perannya dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia dengan terlebih dahulu menangani atau meredakan permasalahan dalam tataran yang lebih kecil (dalam lingkup kawasan). Hal ini terlihat dalam pernyataan Butros Ghali dalam laporan tahunan Sekjen PBB, *An Agenda Peace*, tahun 1992, bahwa ‘pembagian beban yang besar ini tidak hanya terpusat di Eropa, tapi juga di Afrika, Amerika, dan Asia Tenggara.’<sup>14</sup>

Organisasi-organisasi regional kemudian mulai melakukan reformasi internal guna merespon perkembangan sistem internasional. Misalnya, Uni Eropa mulai membuka keanggotaan mereka untuk negara-negara Eropa Timur, disusul kemudian oleh NATO yang mulai melibatkan negara-negara bekas Uni Soviyet. Regionalisme juga berkembang di negara-negara berkembang di mana sebagian besar dari mereka pernah menjadi koloni negara-negara Eropa. Semangat regionalisme ini didasari oleh keinginan menentukan nasib hidup sendiri-sendiri, yang mana “hubungan regional tidak lagi di kondisikan oleh agen-agen politik negara Adikuasa”.

---

<sup>14</sup> Adam Robert, *The United Nations and International Security*. (Summer, 1993).Hlm.7-8 dalam Fawcett dan Hurrel,1995.

Pada umumnya, dengan berakhirnya Perang Dingin melahirkan kesaling tergantungan (Interdependensi) yang lebih besar, ketika *balance of power* negara-negara adikuasa tidak lagi menguasai permasalahan keamanan regional, maka penguasa lokal memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan aliansi internasional mereka. Selain dari pada itu, kesadaran akan pentingnya menjalin kerjasama dalam tataran dan ruang lingkup yang lebih mudah untuk diakses juga menjadi paradig baru dalam melakukan kerjasama dalam kawasan. Terutama yang paling banyak berkembang dalam kerjasama ini adalah dalam sektor ekonomi.

Hal ini di tandai dengan Munculnya Komunitas Erpoa (*European Community*), dan juga NAFTA (North American Free Trade Area) yang di gawangi oleh Amerika Serikat. Ketakutan akan terjadinya pengurangan akses perdagangan kedalam komunitas tersebut, negara-negara seperti yang berada di wilayah Asia terutama di bagian Asia Tenggara juga mencontoh proses regionalisasi dan kerjasama ekonomi seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara Eopa dengan melakukan kerjasama baik dengan Negara-negara yang ada dalam ruang lingkup kawasan Asia tenggara atau dengan negara-negara yang ada di Asia lainnya, seperti di Asia Pasifik lewat APEC (Asia Pasific Economic Cooperation, 1989).

Pendapat lain yang memberikan penjelasan mengenai adanya kecenderungan negara akan keikutsertaannya kedalam regionalisme (kerja sama regional/kawasan) adalah adanya tingkat kesaling tergantungan yang

sangat tinggi antara satu negara dengan negara lain (interdependensi).<sup>15</sup> Selain dari pada itu Interdependensi yang menjadi ciri khusus dari regionalisme antar negara-negara dalam hubungan internasional menjadi salah satu pendorong terbentuknya Organisasi atau asosiasi-asosiasi dalam lingkup regional. ASEAN merupakan salah satu organisasi yang muncul di Asia Tenggara pada 1967 yang merupakan salah satu bentuk organisasi regional di kawasan ini. Akibat adanya Interdependensi atau saling ketergantungan antar negara dalam kawasan ini dimana kondisi mendukungnya negara-negara untuk melakukan kerjasama, baik kerjasama dalam skala universal ataupun kerjasama dalam tataran regional, maka dibentuklah kerjasama antar negara di kawasan ini, seperti ASEAN.

ASEAN terbentuk sebagai sebuah wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara tidak terlepas dari adanya tingkat interdependensi yang cukup tinggi. Interaksi yang cukup intens antar para aktor dari masing-masing negara, kedekatan geografis, dan kebudayaan yang ada, serta pengalaman sejarah yang cukup hampir sama, kecuali beberapa negara seperti Thailand, menjadikan ASEAN sebagai sebuah kebutuhan yang harus ada sebagai sebuah implementasi kerjasama antara negara-negara yang ada di wilayah ini. Tidak adanya derajat interdependensi yang tinggi antar negara-negara, tidak menutup kemungkinan, kalau ASEAN tidak akan pernah muncul.

Pendapat mengenai tingginya tingkat interdependensi antar-negara di atas juga diperkuat oleh aliran pemikiran Neo-liberal institusionalisme.

---

<sup>15</sup> Nuraeni S., dkk, *op.cit*, Hal. 52

Dimana aliran ini berpendapat bahwa dalam melihat tumbuh kembangnya regionalisme, memiliki beberapa argument pokok. *Pertama*, dengan semakin tingginya interdependensi, semakin tinggi pula ‘tuntuan’ untuk melakukan kerjasama. Institusi-institusi pun dibentuk, karena institusi ini dianggap mampu memberikan solusi terhadap berbagai jenis permasalahan secara kolektif. Karenanya, norma, aturan dan institusi-institusi di bentuk dan diputuskan karena hal tersebut mampu membantu negara-negara dalam menghadapi permasalahan bersama. Senada dengan apa yang diutarakan oleh Robert Keohane “Dalam menghadapi koordinasi dan kolaborasi di bawah kondisi interdependensi, pemerintah-pemerintah menuntut (pembentukan) institusi-institusi internasional yang memungkinkan mereka mencapai kepentingan mereka melalui tindakan kolektif terbatas”.<sup>16</sup> *Kedua*, dalam hal ini negara dipandang sebagai aktor dominan (*state centris*) dalam memainkan peranan sebagai pembuat keputusan. *Ketiga*, institusi-institusi itu mempunyai arti atau penting eksistensinya, karena ada keuntungan yang mampu mereka berikan, serta pengaruh mereka terhadap aktor-aktor lain. Keuntungan tersebut bisa berupa ketentuan informasi, transparansi dan monitoring, pengurangan biaya transaksi, pengembangan ekspektasi yang sama, dan memfasilitasi penggunaan produktif dari berbagai strategi yang terkait dengan isu-isu yang dihadapi bersama. Dalam regionalisme, saling keterkaitan antar negara baik dalam hubungannya dengan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan serta sosial dan budaya akan muncul.

---

<sup>16</sup> Nuraeni S., dkk, *op.cit*, Hal.55

Apalagi, yang penting untuk di perhatikan dalam kerangka regionalisme yang kerap kali dilandasi oleh adanya tingkat interdependensi (dalam hal ini kesaling terkaitan) menuntut adanya konsistensi negara sebagai aktor dominan untuk sungguh-sungguh dan bersama-sama menjaga stabilitas internalnya (National Resilience) demi terwujudnya iklim yang stabil di dalam kawasan (Regional Resilience). Pemmasalahan tersebut bisa berupa perang sipil, kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan degradasi lingkungan hidup yang bisa memacu anarkisme dan disintegrasi negara. Hal ini penting, mengingat kemampuan suatu negara dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dialaminya, akan sangat menentukan dan mempengaruhi prioritas kebijakan negara tersebut dalam memandang dan menentukan keberlangsungan stabilitas suatu kawasan. Suasana kawasan yang relatif stabil akan memberikan dampak yang positif terhadap kerjasama yang dilakukan antar negara dalam kawasan tersebut. Dan begitupun sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu menjaga dan mengatasi permasalahan yang dialaminya, dan itu dikhawatirkan merembet pada negara lain, maka hal ini dapat memicu gejolak antar negara yang nantinya akan berpengaruh terhadap stabilitas kawasan, dimana instabilitas kawasan akan berpengaruh negatif terhadap kerjasama antar negara dalam kawasan tersebut.

Selain dari pada itu, munculnya gejolak permasalahan dalam suatu negara dalam sebuah kerjasama kawasan akan memberikan dampak dan hambatan terhadap sebuah institusi yang ada dalam kawasan tersebut. Institusi yang diharapkan sebagai sebuah forum bersama untuk menanggapi segala bentuk permasalahan dan juga sebagai ajang tempat bertemunya para

petinggi negara menjadi terkendala. Gerak langkah institusi dan bentuk responsifitasnya terhadap agenda kerjasama dalam kawasan akan mengalami gangguan. Hal ini terjadi, karena kerjasama yang tumbuh dari kesaling terkaitan dimana negara memegang peranan penting dalam kerjasama tersebut akan menjadi batu sandungan terhadap institusi tersebut dalam memutuskan dan menjalankan fungsinya.

Dengan demikian, regionalisme yang menekankan kesalingtergantungan (interdependensi) sebagai sebuah fenomena yang menyertainya. Permasalahan yang timbul dalam kerangka regionalisme tentunya akan menjadi sebuah permasalahan bersama dan menjadi hambatan bersama yang menuntut adanya tingkat kerjasama secara kolektif yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kesalingtergantungan antara satu negara dengan negara lain untuk menciptakan visi dan misi bersama dalam menciptakan kesejahteraan bersama sangat di pengaruhi oleh kemampuan negara bersangkutan dalam memenuhi komitmennya yang sudah disepakatinya bersama.<sup>17</sup>

Pemahaman yang sama akan arti pentingnya demokratisasi dalam sistem pemerintahan misalnya, dapat menciptakan situasi kondusif dalam stabilisasi politik suatu negara yang bisa memberikan dampak kelancaran terhadap kerjasama dalam kawasan. Dan sebaliknya, demokratisasi yang berjalan kurang normal, akan memicu disintegrasi dan ketidak stabilan politik dalam tingkatan domestik. Sehingga yang kemudian muncul adalah bahwa

---

<sup>17</sup> Ahmad Sulfandi, *Implikasi Kondisi Kolombia Sebagai Weak State Terhadap Keamanan Regional Andean*, Yogyakarta: FISIP UMY, 2009. Hal. 19-20



dalam prioritasnya negara tersebut akan lebih memprioritaskan kebijakan negaranya terhadap pembenahan kedalam internal, dan imbasnya akan mengesampingkan kebijakan luar negerinya. Begitupun dalam hal ekonomi dan keamanan yang sama-sama penting untuk selalu diperhatikan. Karena, keadaan ekonomi yang timpang dan tidak seimbang, bisa memicu tuntutan masyarakat yang jika tidak bisa di jembatani dapat memicu ketidakstabilan politik yang akan merembet pada permasalahan keamanan dalam suatu negara.

Oleh karena itu, regionalisme dalam kerangka ASEAN yang menitik beratkan pada pentingnya memperkuat konsep ketahanan nasional (*National Resilience*) baik secara ekonomi, politik, dan keamanan sebagai sebuah jembatan untuk mencapai ketahanan regional (*Regional Resilience*) sangat signifikan demi memuluskan terwujudnya ASEAN Vision 2020 yang kemudian dipercepat pada 2015 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah di rencanakan.

## **F. Hipotesis**

Denga demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan sementara bahwa: *Krisis politik yang terjadi di Thailand memberikan dampak terhadap destabilisasi Kawasan, tertundanya agenda pembahasan kerja sama ekonomi ASEAN akibat kegagalan penyelenggaraan KTT, serta menurunnya tingkat demokratisasi dan HAM di ASEAN.*

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, penulis perlu membatasi jangkauan penulisannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan atau meluasnya wilayah pembahasan yang hanya akan mempersulit sebuah penelitian. Dengan ditetapkannya pembatasan penelitian, maka akan menjadi sebuah panduan bagi penulis dalam menjawab persoalan yang tengah di kaji.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajiannya pada pengaruh krisis politik di Thailand yang terjadi pada tahun 2006 sampai 2010 terhadap citra dan kinerja ASEAN dalam menghadapi ASEAN community 2015.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Bila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi kita dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis anggap penting untuk di sampaikan dalam karya tulis ini, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Secara garis besar dalam ilmu sosial penelitian dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu (1) dari aplikasinya, terbagi dalam penelitian murni dan penelitian lapangan. (2) dari tujuan yang akan dicapai, terbagi dalam penelitian deskriptif, penelitian korelatif dan penelitian eksplanatif,

serta penelitian eksploratif, (3) dan dari informasi yang dicarai terbagi dalam: penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu sistem, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Karena itu penulisan karya tulis ini bersifat literer, maksudnya studi pustaka, karena diteliti dari bahan-bahan tertulis.<sup>20</sup>

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data *primer* dan data *sekunder*. Data Primer di peroleh dari buku-buku yang diterbitkan. Sedangkan data Sekunder di peroleh penulis dari arsip-arsip, buku, majalah, internet, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Disini penulis lebih banyak bertumpu pada studi dokumen dari data yang diperoleh seperti yang sudah di sebut dalam point 2 di atas yaitu, sumberdata yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial (I)*, Yogyakarta: FISIP UMY, 1999, hal.6

<sup>19</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1998, Hal.63

<sup>20</sup> Tatang M.Anwar, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta;Rajawali, 1996, hal.135

obyek yang dikaji dalam tulisan ini. Data primer merupakan data pokok yang di jadikan oleh penulis, dan data sekunder sebagai pendukung dalam pembahasan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif, yaitu: menganalisi data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data.<sup>21</sup> Analisis data merupakan proses mengorganisasi dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait baik data primer maupun data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang tengah di kaji. Selanjutnya mengadakan reduksi data untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu penting dalam pertanyaan, memfokuskan pengumpulan data, sampel, dan metode sampai pada kesimpulan dengan berupa abstraksi

Tahapan berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan keabsahan data yang terjaga. Terakhir adalah dengan melakukan penafsiran atau interpretasi atas teks sebagai bentuk analisa sampai pada penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian.

---

<sup>21</sup> Masri singarimbun dan Sfyand Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1989, hal.21

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam membuat sebuah karya ilmiah, sistematika penulisan perlu dilakukan agar lebih sistematis. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya sebagai berikut:

**BAB I**, dalam bab ini berisikan pendahuluan yang yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II**, dalam bagian ini akan membahas Regionalisme di Asia Tenggara melalui mekanisme ASEAN

**BAB III**, dalam bab ini akan membahas tentang kudeta yang mewarnai perpolitikan di Thailand, karakter budaya politik Thailand, dan militer dalam Politik Luar Negeri Thailand

**BAB IV**, dalam bagian ini akan membahas tentang bentuk-bentuk pengaruh negatif dari krisis politik di Thailand terhadap kerjasama ASEAN

**BAB V**, merupakan kesimpulan sebagai penutup dari tulisan.